



PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok)

Yuqa Diana Khairi, Wahyu Meiranto ¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to identify the effect of Regional Financial Supervision, Accountability and the influence of Regional Financial Management Transparency on the Regional Government Performance Solok Regency. The sample used in this study was 110 respondents from echelon III and IV employees at 5 agencies and 17 regional apparatus organization offices (OPD) of Solok Regency. The data used are primary data with data collection methods, namely the distribution of questionnaires/questionnaires directly measured by a Likert scale. The data used are primary data with data collection methods, namely the distribution of questionnaires/questionnaires directly measured by a Likert scale. Hypothesis testing is done by using multiple linear regression analysis method using IBM SPSS 25 software. The results of this study indicate that the Regional Financial Supervision, Accountability and the Transparency of Regional Financial Management has a positive effect on The Performance of the Solok Regency Government.

Keywords: Supervision, Accountability, Transparency, Financial Management Performance of local government.

PENDAHULUAN

. Ketidakpuasan publik atas penyelenggaraan otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah sebagai salah satu topik pembicaraan publik saat ini, yang mana pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik dalam melaksanakan kinerja. Rakyat menuntut pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dapat menghasilkan kinerja yang baik dalam perwujudan konsep otonomi daerah. Tingginya asumsi masyarakat tentang penerapan mekanisme *self governing* oleh pemerintah daerah menjadikan kinerja daerah menjadi salah satu kekuatan di tingkat nasional karena masyarakat belum merasakan hasil pemerintah secara optimal. Pemerintah Daerah akan lebih menekankan prinsip dan karakteristik pemerintahan dalam mewujudkan suatu pelaksanaan otonomi daerah yang baik. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengungkapkan Pemerintah Daerah yaitu perangkat daerah selaku bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengarahkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang sebagai kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom memiliki hak, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat daerah.

Mardiasmo (2006) mengatakan bahwa ciri-ciri penerapan *Good Governance* diantaranya: a. *Accountability*. b. *Effectiveness*. c. *Equity*. f. *Transparency*. g. *Responsiveness*. h. *Consensus Orientation*. i. *Efficiency*. Pengawasan, akuntabilitas dan transparansi merupakan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan suatu kinerja. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi upaya dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik secara keseluruhan. Dalam reformasi birokrasi pemerintahan, akuntabilitas akan lebih

¹ *Corresponding author*



ditekankan sehingga diperlukan manajemen kinerja yang baik. Melalui transparansi kontrol pemerintahan, masyarakat dapat mengetahui kebijakan serta keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan memberikan umpan balik atas kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Berbagai argumen memberitahukan betapa pentingnya penerapan pengawasan keuangan, transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah termasuk salah satunya Kabupaten Solok. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dituntut dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien saat mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya. Hasil dari kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah di gambarkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Setiap OPD yang berada di pemerintah daerah harus menyiapkan langkah strategi dalam mengoptimalkan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah).

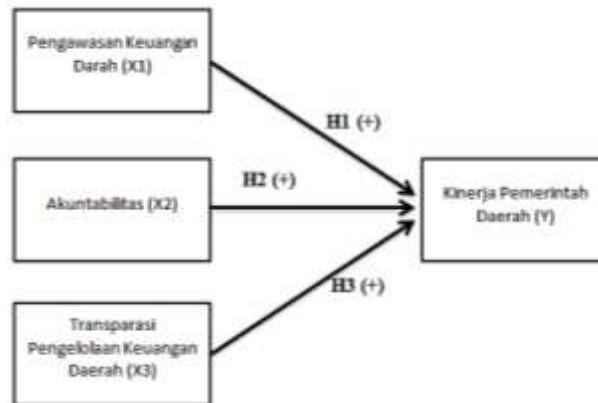
Berdasarkan Informasi terkait Pemerintahan Kabupaten Solok yang penulis kutip dari website posmetopadang.co.id dijelaskan bahwa pada tahun 2018 dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendapatkan nilai 62,53 dengan predikat B dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan nilai 65,80 masi dengan predikat B yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dalam penilaian LAKIP yang dievaluasi dari Pemerintah Kabupaten Solok tersebut terdapat 5 komponen yang dinilai dengan bobot yang berbeda diantaranya capaian kinerja bobotnya 20, evaluasi internal bobotnya 10, pelaporan kinerja bobotnya 15 dan pengukuran kinerja bobotnya 25 serta perencanaan kinerja bobotnya 30. Dari hasil LAKIP tersebut menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang berjalan masih belum maksimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok masi belum dapat mencapai predikat BB/A, meskipun predikat B sudah baik. Belum tercapainya predikat BB/A dikarenakan adanya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan predikat B dikarenakan kurangnya peningkatan kinerja sehingga diperlukannya upaya untuk memperbaiki SAKIP dengan membina kerja sama serta melakukan peningkatan kinerja untuk menghasilkan kualitas kinerja yang memuaskan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Variabel independen pada riset ini yaitu Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam riset yaitu Kinerja Pemerintah Daerah. Hipotesis yang diajukan yaitu variabel independen memiliki hubungan positif yang mana semakin baik pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada suatu pemerintah daerah maka kinerja pemerintah daerah akan semakin maksimal pula.

Kinerja pemerintah daerah yaitu gambaran keseluruhan pencapaian selama otonomi daerah serta keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dapat diukur dan dicatat (Nasir & Oktari, 2011). Pengawasan keuangan daerah yang dimaksud yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban APBD yang dimulai dari tahap perencanaan, persetujuan atau pengesahan hingga pelaksanaan anggaran (Rachman, 2014 dalam Akmalia, 2020). Akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala tindakan dan memastikan bahwa semua tindakan atau kegiatan suatu organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka (Martha, 2014). Transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud yaitu kegiatan memberikan masyarakat informasi mengenai keuangan yang jujur dan terbuka berdasarkan pengkajian bahwa publik berhak untuk secara menyeluruh mengetahui sekaligus terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah yang dipercayakan kepadanya dalam ketaatan pada hukum dan undang-undang serta pengelolaan sumber daya (Standar Akuntansi Pemerintah, 2010). Teori dasar yang digunakan dalam riset yaitu teori *Stewardship*. Donaldson dan Davin (1991) dalam Pasoloran dan Oktavianius (2001) mengatakan bahwa Teori *Stewardship* dimaksud sebagai teori yang mendeskripsikan manajer yang tidak terpengaruh terhadap tujuan perorangan tetapi lebih memprioritaskan kepentingan instansi, sehingga teori ini memiliki akar psikologis dan sosiologis yang menggambarkan manajer sebagai *steward* untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai kepentingan *principals*. Teori ini menjelaskan hubungan erat antara kepuasan pemilik dengan keberhasilan organisasi.

Gambar I
Kerangka Pemikiran Teoritis



1. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam Organisasi Sektor Publik pengawasan biasanya diartikan sebagai sebuah prosedur yang dilakukan secara berulang untuk menilai, mengamati dan memahami suatu proses kegiatan agar pemerintah daerah bisa berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan *stewardship theory*, pemerintah daerah sebagai *steward* membentuk tujuannya dan dituntut untuk memberikan pelayanan agar sesuai dengan tujuan *principals*. Salah satu pencapaian pemerintah daerah dalam keberhasilan menyediakan pelayanan yang efektif dan efisien adalah dengan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Suatu kinerja yang maksimal dapat timbul karna adanya suatu pengawasan yang baik pula, sehingga pengawasan adalah hal yang sangat menentukan dalam peningkatan kinerja. Sehingga hipotesis pertama yang diajukan:

H1: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok

2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas memiliki kaitan erat dengan kinerja pemerintah karena akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi publik terhadap kepentingan masyarakat sehingga dapat mendorong *steward* (pemerintah) dalam menjalankan program yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan *principals* (rakyat) sesuai dengan *stewardship theory*. Akuntabilitas memiliki kaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dimana akuntabilitas merupakan unsur kebutuhan dalam menyusun anggaran berbasis kinerja. Pemerintah sebagai *steward* harus dapat mengungkapkan laporan keuangan dengan azas akuntabel dan transparan kepada publik yang mengakibatkan akuntabilitas sangat penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah yang memiliki pengaruh besar terhadap suatu kinerja. Hipotesis kedua yang diajukan yaitu :

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok

3. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan berbagai undang-undangan serta pedoman terkait pengimplementasian gagasan akuntabilitas dan transparansi selama pengelolaan keuangan akan membantu terwujudnya tata kelola *steward* yang maksimal bagi masyarakat dan berpihak kepada *principals* (masyarakat). Transparansi merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap masyarakat dalam peningkatan manajemen penganggaran dan pengelolaan yang optimal sesuai dengan *stewardship theory*. Salah satu cara agar pemerintah daerah berhasil mengelola dana yang ada adalah dengan melakukan prinsip transparansi atas pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat. Dengan adanya prinsip transparansi, masyarakat dapat mengetahui dan menilai kebijakan apa yang diambil pemerintah mengenai anggaran daerah. Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan yaitu :

H3: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian asosiatif kausal, dimana penelitian asosiatif kausal yakni penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis hipotesis antara beberapa variabel yang digunakan (Sugiyono, 2013). Setiap variabel dalam penelitian ini diajukan dengan pernyataan yang dapat diukur melalui Skala Likert. Penelitian ini dilakukan di 5 badan dan 17 dinas OPD Kabupaten Solok. pengambilan sampel yang akan diteliti dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan metode dengan menggunakan beberapa kriteria dengan medistribusikan 5 kuesioner tiap Organisasi Perangkat daerah (OPD) sehingga sampel berjumlah 110 responden.

Data penelitian yang digunakan berdasarkan sumber yaitu data primer. Data primer bersumber dari hasil penyebaran angket yang sudah dijawab oleh responden yaitu pegawai eselon III dan pegawai eselon IV di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang dijadikan sebagai sampel. Metode pengumpulan data pada riset ini ialah berupa pengumpulan angket. Angket ialah kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertulis yang sudah disusun secara sistematis mengenai hal yang saling terkait dengan variabel yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Kuesioner akan di serahkan secara langsung kepada responden untuk mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi.

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis yaitu analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji t dan uji F.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel I
Deskripsi Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (X1)

Kode	Frekuensi					N	SUM	MEAN	TCR
	STS	TS	KS	S	SS				
X1_1	0	1	2	76	31	110	467	4,24545	93,40
X1_2	0	0	2	66	42	110	480	4,36364	96,00
X1_3	0	0	0	61	49	110	489	4,44545	97,80
X1_4	0	0	1	72	37	110	476	4,32727	95,20
X1_5	0	0	1	72	37	110	476	4,32727	95,20
X1_6	0	0	0	71	39	110	479	4,35455	95,80
X1_7	0		1	57	52	110	491	4,46364	98,20

Sumber : Data primer diolah 2021

Tabel II
Deskripsi Variabel Akuntabilitas (X2)

Kode	Frekuensi					N	SUM	MEAN	TCR
	STS	TS	KS	S	SS				
X2_1	0	0	2	87	21	110	459	4,17273	91,80
X2_2	0	0	0	86	24	110	464	4,21818	92,80
X2_3	0	0	4	80	26	110	462	4,20000	92,40
X2_4	0	0	2	85	23	110	461	4,19091	92,20
X2_5	2	2	18	71	17	110	429	3,90000	85,80
X2_6	0	0	4	82	24	110	460	4,18182	92,00
X2_7	0	0	4	85	21	110	457	4,15455	91,40
X2_8	0	0	5	85	20	110	455	4,13636	91,00

Sumber : Data primer diolah 2021

Tabel III
Deskripsi Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)

Kode	Frekuensi					N	SUM	MEAN	TCR
	STS	TS	KS	S	SS				
X3_1	0	2	20	83	5	110	421	3,82727	84,20
X3_2	0	5	19	85	1	110	412	3,74545	82,40
X3_3	0	0	14	50	46	110	362	3,29091	72,40
X3_4	0	3	21	85	1	110	414	3,76364	82,80
X3_5	0	0	17	90	3	110	426	3,87273	85,20
X3_6	0	13	28	63	6	110	392	3,56364	78,40

Sumber : Data primer diolah 2021

Tabel IV
Deskripsi variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Kode	Frekuensi					N	SUM	MEAN	TCR
	STS	TS	KS	S	SS				
Y_1	0	0	2	61	47	110	485	4,40909	97,00
Y_2	0	0	2	76	32	110	470	4,27273	94,00
Y_3	0	0	9	70	31	110	462	4,20000	92,40
Y_4	0	0	3	76	31	110	468	4,25455	93,60
Y_5	0	2	6	84	18	110	448	4,07273	89,60

Sumber : Data primer diolah 2021

Berdasarkan Tingkat Capaian Responden (TCR) pada variable yang digunakan dalam riset menunjukkan nilai yang berada pada rentang 66%-84% dan 95%-100% yang menunjukkan deskripsi variabel pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah menunjukkan sudah termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi.

2. Kualitas Data

Uji Validitas data

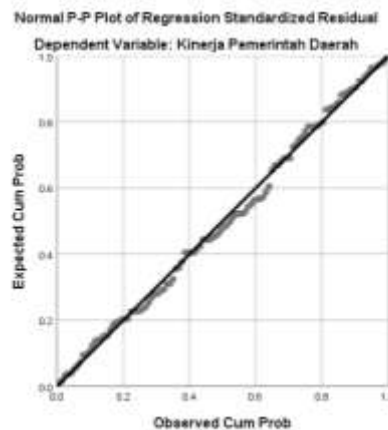
Setiap item pernyataan yang digunakan dalam variabel memiliki nilai r_{hitung} (koefisien korelasi) lebih besar dari r_{tabel} dimana $df=n-2$ dengan signifikan 5%, yaitu 0,1576 sehingga dapat dinyatakan tiap item pernyataan pada variabel adalah valid.

Uji Reliabilitas Data

Suatu variabel bisa diakui reliabel apabila nilai alpha besar dari 0,06 dan apabila mendekati satu maka makin tinggi tingkat kehandalan variabel tersebut. Berdasarkan pengamatan tabel 4.8 bahwa nilai alpha pada pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah besar dari 0,06 sehingga variabel yang digunakan pada riset ini dinyatakan reliabel

3. Asumsi Klasik

Gambar II
Normal Probability Plot



Uji Normalitas Gambar *Normal Probability Plot* menunjukkan bahwa titik dalam grafik mengikuti garis diagonal yang bisa disimpulkan bahwa data sudah terdistribusi dengan normal. Karena telah terpenuhinya asumsi klasik normal residual model regresi yang digunakan pada riset ini bisa dikatakan layak.

Tabel V
Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Nilai Signifikan absolut residual
	Tolerance	VIF	
Pengawasan Keuangan Daerah (X1)	0,789	1,267	0,068
Akuntabilitas (X2)	0,783	1,277	0,232
Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah (X3)	0,951	1,052	0,551

Sumber: Data primer diolah 2021

Hasil Uji Multikolinearitas mengungkapkan bahwa nilai *tolerance* tiap variabel independen > 0,01 dan nilai VIF tiap variabel independen kecil dari 10,0 sehingga kesimpulan yang bisa didapat yaitu tidak adanya gejala multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

Hasil Uji Heteroskedastisitas yang dilakukan dengan *Uji Glejser* menunjukkan bahwa nilai signifikan pada absolute residual tiap variabel independen besar dari 0,05. Sehingga kesimpulan yang bisa dinyatakan yaitu tidak adanya gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikan antara variabel independen dan absolute residual besar dari 0,05.

4. Uji Regresi

Model Regresi yang dilakukan adalah analisis regresi linear berganda. Uji regresi yang dilakukan dalam penelitian adalah uji koefisien determinasi, uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).

Tabel VI
Uji Regresi

Objek Ui	Adj R Square	F	Beta	t	Sig.
Model Regression	0,408	26,036			
Konstanta			-0,01	-0,004	0,997
Pengawasan Keuangan Daerah (X1)			0,346	5,406	0,00
Akuntabilitas (X2)			0,323	3,987	0,00
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)			0,134	2,046	0,043

Sumber : Data Primer diolah 2021

Model regresi dapat menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen yang memengaruhi variabel dependen. Dari uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu, pada tabel menunjukkan nilai koefisien tiap variabel individu memiliki nilai positif yang mana variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Dari nilai F hitung yaitu sebesar 26,036 lebih besar dari F tabel yaitu 0,05 dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh seluruh variabel independen secara bersamaan.

H1 : Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok. Hipotesis diterima.

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok. Hipotesis diterima.

H3: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok. Hipotesis diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Solok sudah mempunyai sistem pengawasan keuangan yang efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai koefisien regresi untuk pengawasan keuangan daerah memiliki nilai positif yaitu 0,346 dan nilai signifikan adalah 0,00 yang berarti bahwa dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok dipengaruhi secara positif oleh pengawasan keuangan daerah. Sehingga semakin tinggi sistem pengawasan keuangan daerah maka dapat membantu dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok. Pada riset ini pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja pemerintah daerah dibandingkan variabel lainnya. Terbukti bahwa inspektorat mereview setiap laporan keuangan ODP yang digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen serta dilakukannya *financial audit* terhadap laporan keuangan sebelum diserahkan kepada BPK. Setelah dilakukannya evaluasi OPD juga melakukan tindakan perbaikan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hasil tersebut sejalan dengan H1 dimana pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil penelitian ini sesuai dengan riset yang dilakukan Akmalia (2020), Badruzzaman (2018), Nadirsyah (2016) mengatakan bahwa pengawasan memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan variabel akuntabilitas mempunyai nilai koefisien yaitu 0,232 dan nilai signifikan yaitu 0,00 yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Solok telah memiliki azas akuntabilitas yang baik. Hal ini terbukti bahwa dalam pengambilan keputusan setiap OPD telah menjalankan bentuk pertanggungjawaban yang sudah memenuhi nilai etika dan setiap kebijakan yang diambil OPD mempunyai sasaran yang jelas sehingga azas akuntabilitas pada pemerintah daerah Kabupaten Solok memiliki nilai positif yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok. Hasil tersebut sejalan dengan H2 dimana akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan riset yang dilakukan *Auditya et al.*, (2013), *Wiguna et al.*, (2015), Nadirsyah (2016) mengatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan Kabupaten Solok telah memiliki azas transparansi pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal ini terbukti dari nilai koefisien regresi transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah 0,134 dan nilai signifikan 0,043 yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Solok telah memiliki azas transparansi pengelolaan keuangan daerah yang berpengaruh secara positif dalam memaksimalkan kinerja pemerintahan. Pemerintah daerah

Kabupaten Solok telah menyediakan beberapa media sebagai sarana pendukung untuk memperoleh informasi baik keuangan dan non-keuangan yang ada di setiap OPD Kabupaten Solok meskipun ada beberapa OPD masi kurang dalam menjalankan azaz transparansi pengelolaan keuangan daerah dikarenakan takut dipersalah gunakan oleh beberapa oknum yang ingin mengambil keuntungan sendiri. Hasil tersebut sejalan dengan H3 dimana transparansi pengelolaan keuanga daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga **H3 diterima**.

Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Akmalia (2020), Badruzzaman (2018), Nadirsyah (2016) dan *Auditya et al.*, (2013) yang mengatakan bahwa kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan keuangan daerah

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok. Objek yang digunakan dalam studi sebanyak 22 OPD Kabupaten Solok dengan melakukan penyebaran kuesioner atau angket yang didistribusikan langsung kepada responden. Setiap OPD didistribusikan 5 kuesioner dengan kriteria *purposive sampling* yaitu pegawai eselon III dan eselon IV sehingga didapatkan 110 sampel yang digunakan untuk penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data, pengujian serta interpretasi data, kesimpulan penelitian ini yang dapat diambil yaitu Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok, Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok, serta Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penyebaran angket yang tidak diberi waktu secara detail yang memungkinkan adanya pengisian angket yang tidak dijawab langsung sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan memiliki keterbatasan terhadap data yang di ambil hanya melalui kuesioner yang telah di sebarakan.

REFERENSI

- Akmalia, D. (2020). *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Kota Lhoksemawe*. <http://36.89.46.245:8080/xmlui/handle/123456789/780?show=full>
- Auditya., husaini., & L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–41.
- Badruzzaman, S. (2019). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat) [Universitas Pasundan]. In *insitutional repositories & scientific journals*. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/37365%0A>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universita Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1).
- Martha, W. (2014). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kota Bandung*. Skripsi Universitas Widyatama.
- Nadirsyah & F.Purnama. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Journal of Home Economics of Japan*, 42(2), 191–193. <https://doi.org/10.11428/jhej1987.42.191>
- Nasir, A., & Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Journal Ekonomi*, 19(2).
- Pasoloran, Oktavianus., F. A. R. (2001). *Teori Stewardship : Tinjauan Konsep dan Impilkasinya*



- pada Akuntansi Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 418–432.
- Posmetopadang.co.id. (2020). <https://posmetropadang.co.id/sakip-2019-kabupaten-solok-raih-predikat-b/>. 12 Mei.
- Rembiring, R. P. S. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah* (Issue 28 April) [Universitas Medan Area]. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12105>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2010). *Standar Akuntansi Pemerintah*. (2010).
- Republik Indonesia. (2014). UU No. 32 Tahun. (2014). *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Wiguna, M. B. S., Yuniartha, G. A., & Darmawan, N. A. S. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3(No. 1), 1–12.